DEMOKRASI DALAM PANDANGAN
AYATULLAH IMAM KHOMEINI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat Islam

Oleh:

Joni Amran
NIM. 03511371

PEMBIMBING:

Drs. Sudin, M. Hum
H. Shofiyullah, Mz. S. Ag. M. Ag

JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

Drs. Sudin, M. Hum
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Sdr. Joni Amran

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Joni Amran
Nim : 03511371
Judul : **Demokrasi dalam Pandangan Ayatullah Imam Khomeini**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan **Aqidah dan Filsafat** fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tesebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. WB.

Yogyakarta, 13 Mei 2009
Pembimbing I

Drs. Sudin, M. Hum
Nip. 150239744

H. Shofiyullah, Mz. S. Ag. M. Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Sdr. Joni Amran

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Joni Amran
Nim : 03511371
Judul : **Demokrasi Dalam Pandangan Ayatullah Imam Khomeini**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sajana strata satu dalam jurusan **Aqidah dan Filsafat** fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tesebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. WB.

Yogyakarta, 13 Mei 2009
Pembimbing II

H. Shofiyullah, Mz. S. Ag. M. Ag
Nip. 150299964

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1058/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Demokrasi Dalam Pandangan Ayatullah Imam Khomeini*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Joni Amran
NIM : 03511371

Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, tanggal: 04 Juni 2009
dengan nilai : 88,5 (A / B)
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Sudin, M.Hum
NIP. 19600110 198903 1 001

Penguji I

Muh. Fatkhan, S.Ag, M.Hum
NIP. 19720328 199903 1 002

Penguji II

Drs. Sudin, M.Hum
NIP. 19600110 198903 1 001

Yogyakarta, 04 Juni 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin
DEKAN

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
NIP. 19591218 198703 2 001

MOTTO

"pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tak akan pernah menghilang dari muka bumi ini".

Oleh: Abbraham Lincoln

Jangan sesekali ingin kembali pada masa lalu,
yang terkadang banyak menyimpan kesalahan dan dosa.
Dan kesalahan yang terburuk dalam hidup adalah mengulang kesalahan dan dosa yang sama.
7777777

PERSEMBAHAN

Teruntuk!!!

Apak (almarhum) dan Amay
Uan dan Uni
Adek dan Keponakan
Serta Seluruh Keluarga Besarku
Dan
Almamater MTI Pasir dan Ushuluddin UIN SUKA
Terimakasih…….

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,* Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet

س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama

َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a-i
وَ	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa* حول ----- *haula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	A	A dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	A	A dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	I	I dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	u	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qala* قيل ---- *qila*

رمي ---- *rama* يقول ---- *yaqulu*

3. Ta *marbutah*

a. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah "t".

b. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati adalah "h".

c. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ------- *raudatul atfal,* atau *raudah al-atfal*

المدينة المنورة ------- *al-Madinatul Munawwarah,* atau *al-Madinah al- Munawwarah*

طلحة ---------- *Talhatu* atau *Talhah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل ------ *nazzala*

البر ------- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم -------- *al-qalamu*

الشمس ------ *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

الارسول ومامحمد -----*Wa ma Muhammadun illa rasul*

ABSTRAK

Hubungan anatara Islam dan demokrasi atau dengan kata lain, potensi demokrasi Islam sebagai sebuah agama, budaya, dan peradaban, cukup sering menjadi bahan perdebatan yang hebat dan bahan diskusi yang menarik dikalangan para intelektual muslim atau pun para intelektual orientalis. Seiring dengan itu tuntutan demokrasi cukup *santer* kita dengar dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dipenjuru dunia tidak terkecuali Indonesia yang mayoritas Muslim. Bila ditelususri buku-buku yang berkaitan dengan topik demokrasi dan sistem pemerintahan yang ditulis oleh pemikir Muslim kontemporer, maka akan ditemukan begitu banyak kontroversi dan silang pendapat. Sebagian beranggapan bahwa antara Islam dan demokrasi tidak memiliki kaitan sama sekali, Islam tidak mengenal kata demokrasi. Umat muslim tidak bisa begitu saja mengadopsi demokrasi secara mentah-mentah, karena dalam demokrasi, kedaulatan berada ditangan rakyat dan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah. Sementara sebagian yang lainnya berpendapat bahwa demokrasi adalah bagian dari Islam itu sendiri karena demokrasi sejalan dengan ajaran Islam.

Dalam rangka berusaha untuk menemukan jawaban atas peramasalahan ini, penulis mencoba melihat dari pemikiran seorang tokoh yang cukup memberi pengaruh dalam konstelasi pemikiran politik umat Islam dewasa ini, khususnya dalam menelanjangi topik demokrasi. Dia adalah Ayatullah Imam Khomeini dari Iran yang kini bernama Republik Islam Iran, maka penulis menyajikan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pandangan dan kritik Ayatullah Imam Khomeni terhadap demokrasi? dan apa bentuk tawaran yang diberikannya pada dunia perpolitikan Islam dalam menanggapi persoalan demokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan murni. Semua karya-karya yang terkait dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membaca pemikiran tokoh. Dalam segi pendekatan, penulis akan menggunakan pendekatan filosofis-historis. Sedangkan untuk memudahkan pengolahan data maka, penulis mempergunakan metode deskriptif-interpretatif.

Hasil yang didapat adalah, bahwa Ayataullah Imam Khomeini memandang konsep kedaulatan rakyat, yang merupakan inti dari demokrasi disatu sisi-sisi bertentangan dengan keyakianan Islam yang mengakui kedaulatan satu-satunya hanyalah milik Allah, namun di sisi lainnya demokrasi memberikan reaksi positif karena Islam itu sendiri sangat menjunjug tinggi akan harkat-martabat dan kebebasan manusia. Dengan demikian demokrasi haruslah bergantung pada prinsip-prinsip agama-suci (Islam). Karena kebeasan itu mesti dibatasi dengan hukum, dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam dan Konstitusi, dengan cara yang sebaik-baiknya. Sehingga pemerintahan yang adil dan demokratis dalam makna yang sebenarnya berhasil untuk diwujudkan. Kehendak rakyat harus sejalan dengan kehendak Tuhan dan mekanisme kesejajaran kehendak tersebut dijaga oleh mekanisme yang disebut Ayataullah Imam Khomeini dengan *wilayah al-faqih,* dan ini merupakan suatu bentuk tawaran Ayatullah Imam Khomeini terhadap dunia perpolitikan Islam, khususnya Republik Islam Iran.

KATA PENGANTAR

بـــــسم الله الرحمن الرحيـــــم

الحمد لله الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اما بعد.

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta Salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya kepada jalan yang lurus.

Syukur walhamdulillah penulis ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Sehingga saran dan kritik sangat penulis harapkan dari para pembaca, tentu saja kritiknya adalah kritik yang konstruktif dan membangun (*critic to build)* bukan kritik yang menjatuhkan (*critic to down*). Meskipun begitu, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. DR. H.M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Yth. Ibu. Dr. Sekar Ayu Aryani, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushulluddin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Bapak Fahruddin Faiz, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat dan Bapak Fahruddin Faiz, S. Ag. M.Ag., selaku Sekretaris.
3. Yth. Bapak Drs. Sudin, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Yth. Bapak H. Shofiyullah, Mz. S. Ag, M. Ag, selaku Penasehat akademik penulis, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Apak (almarhum) dan Amay, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan do'a desetiap denyut nadi dan langkah kakiku. Semoga Allah mengasihi keduanya sebagaimana mereka mengasihiku semasa kecilku.
6. Uwan dan Uni, adek serta keponakan dan seluruh keluarga besarku, terimakasih atas dukungannya, kalian menjadi motivasi tersendiri bagiku.
7. Tak lupa buat al-mamaterku AF "03".
9. Buat al-Mamaterku MTI Pasir.
10. Buat rekan-rekan "Surau Tuo" tanpa di sebutkan satu persatu.

Buat semua pihak yang telah turut serta membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga jasa dan amal baik mereka menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang layak disi Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca sekalian. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 13 Mei 2009

Penulis

Joni Amran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..... i

NOTA DINAS…… ii

HALAMAN PENGESAHAN…….. iv

HALAMAN MOTTO…… v

HALAMAN PERSEMBAHAN…… vi

PEDOMAN TRANSLITERASI…….. vii

ABSTRAK…… xii

KATA PENGANTAR……. xiii

DAFTAR ISI…… xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Metode Penelitian 10

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II AKAR HISTORIS DEMOKRASI SERTA PERKEMBANGANNYA

A. Pengertian Demokrasi..... 14

B. Demokrasi dalam Tradisi Barat: Dilihat dari Sejarahnya..... 19

C. Demokrasi dalam Tradisi Islam 25

BAB III PUSARAN INTEKTUAL AYATULLAH IMAM KHOMEINI

A. Biografi Singkat Ayatullah Imam Khomeini 38

B. Latar Belakang Pemikiran Ayatullah Imam Khomeini 41

C. Kondisi Sosiso Historis..... 55

D. Karya- Karya Ayatullah Imam Khomeini..... 58

BAB IV ANALISIS DEMOKRASI DALAM PANDANGAN AYATULLAH IMAM KHOMEINI

A. Pandangan dan Kritik Ayatullah Imam Khomeini Terhadap Demokrasi 61

B. Konsep Wilayat al-Faqih Sebagai Tawaran Ayatullah Imam Khomeini dalam Menanggapi persoalan Demokrasi..... 66

C. Relevansi Wilayat al-Faqih dengan Sistem Demokrasi…… 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran dan Rekomendasi 85

DAFTAR PUSTAKA 86

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan politik dalam Islam kelihatannya sudah menjadi bahan diskusi yang berkepanjangan sejak wafatnya Nabi Muhammad S.a.w. hingga sekarang. Ibarat menimba air zam-zam di Tanah Suci, pembicaraan atau wacana ini tidak akan ada habis-habisnya yang disebabkan oleh beberapa persoalan utama. *Pertama*, disebabkan karena kekayaan sumber bahasan, sebagai buah dari lima belas abad sejarah akumulasi pengalaman dunia Islam dalam membangun kebudayaan dan peradaban. *Kedua*, dikarenakan oleh kompleksitas permasalahan poltik dalam Islam, sehingga setiap pembahasan dengan sendirinya tergiring untuk memasuki satu atau beberapa pintu pendekatan yang terbatas. Pembahasan yang menyeluruh akan menuntut tidak saja kemampuan yang juga menyeluruh, tetapi juga kesadaran untuk tidak membiarkan diri terjerembab ke dalam reduksionisme[1] dan kecenderungan penyederhanaan persoalan. *Ketiga*, disebabkan pembahasan tentang politik dalam Islam ini akan terus berkepanjangan, mengingat sifatnya yang mau tak-mau melibatkan pandangan idiologis berbagai kelompok masyarakat, khususnya kalangan kaum muslim sendiri.[2]

---

[1] Reduksionisme atau Reductionism dalam filsafat sains berarti keyakinan bahwa seluruh bidang ilmu pengetahuan dapat direduksi menjadi sejenis metodologi, atau pada sebuah sains, yang meliputi prinsip-prinsip yang berlaku pada seluruh fenomena. Sejenis benda yang ultima, pasti, dan sangat nyata seperti substansi, proses, materi, Tuhan, bentuk, dan gagasan. Lihat. *Kamus Filsafat* (Bandung: Rosdakarya1995), hlm. 284.

[2] Nurcholis Madjid, *Islam dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan*, Jurnal Pemikiran Islam Paramdina, Vol. 1, No. 1 (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 48.

Begitu pula halnya dengan topik demokrasi dalam Islam, yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat muslim sehingga diskursus-diskursus lain yang melawan kecenderungan ini mau tidak mau mengalami terpinggirkan. Secara tidak langsung demokrasi seolah-olah telah dianggap sebagai suatu kemestian. Ada pun sistem pemerintahan yang telah ada selama ini seakan-akan telah luntur dan takluk oleh keperkasaan demokrasi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara kawasan Eropa, Asia, Afrika Latin atau berbagai negara bekas komunis saja, tetapi hampir seluruh negara dari berbagai belahan dunia merayakan demokrasi, tidak terkecuali Indonesia dan negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim.[3]

Kesadaran akan kekinian membuahkan pemikiran yang baru dan berujung dengan mempertanyakan masa lalu. Haruskah kita yang hidup pada zaman dengan tingkat peradaban yang sudah demikian maju dan telah mampu mengatur kehidupan kita bernegara dengan cara yang lebih baik, masih harus jalan di tempat atau mencontoh model atau pola kehidupan bernegara pada zaman Rasul dan Al-Khulafā al-Rasyīdin yang ternyata masih demikian sederhana dan belum memiliki pola yang baku dan andal.[4]

Tetapi dibalik keperkasaan demokrasi, sebenarnya ia masih menyimpan banyak keraguan dan kontroversial bagi banyak kalangan umat Islam. Kecaman terhadap demokrasi sering kali mencuat di masyarakat dan

---

[3] Khamami Zada dan Arif R. Arafah, *Diskursus Politik Islam* (Jakarta: LSIP, 2004), hlm. 31.

[4] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5 (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 172.

para pemikir Islam. Munculnya berbagai macam pertanyaan, apakah demokrasi sesuai dengan Islam? Dan kenapa harus demokrasi?

Bila ditelusuri buku-buku yang berkaitan dengan topik demokrasi dalam Islam – untuk menyebut beberapa pemikir muslim – seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abu al-A'la al-Maududi, Ayātullah Imām Khomeini , Ali Abd Rizq, Hasan Hanafi, Muhammad Arkoun, Muhammad Syahrur, Muhammad Abid al-Jabiri, Abdullahi Ahmed an-Na'im atau dari Indonesia muncul orang-orang seperti Muhammad Natsir, Hamka, Agus Salim, Hasbi as-Shidiqi, Abdurrahman Wahid, Muhammad Amien Rais, Nurcholis Madjid, Emha Ainun Nadjib, Ulil Absar Abdalla dan lain sebagainya maka kita akan menemukan begitu banyak konteroversi dan silang pendapat di dalamnya.

Sebagian beranggapan bahwa antara demokrasi dan Islam tidak memiliki keterkaiatan sama sekali, Islam tidak mengenal demokrasi. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa demokrasi adalah bagian dari Islam. Demokrasi adalah suatu keharusan yang tidak boleh tidak, ia adalah syarat mutlak bagi kemajuan peradaban suatu bangsa. Adapun kelompok yang terakhir berpendapat bahwa antara demokrasi dan Islam terdapat pertautan sekalian perbedaan.[5]

Dari berbagai kontroversi dan silang pendapat yang ada, akan diteliti pemikiran dari seorang tokoh yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran

---

[5] Kifralwi Suparda, *Islam dan Demokrasi dalam Pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri dan Abu Al-A' la Maududi*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga: 2007, hlm. 14 (tidak diterbitkan).

intelektual muslim, seorang tokoh revolusi Iran. Yaitu Ayātullah Imām Khomeini.

Beliau adalah salah seorang tokoh yang memiliki pemikiran yang khas dalam menanggapi segala bentuk permasalahan politik Islam khususnya keberanian beliau mengkritik dan menelanjagi permasalahan demokrasi, bahkan hingga sekarang pemikirannya tergolong banyak dijadikan sebagai referensi dalam berbagai kajian dan seminar.

Salah satu karya terbesar juga terbaik Ayātullah Imām Khomēini adalah buku "Pemerintahan Islam" yang dijadikan sebagai seri perkuliahan yang diberikan oleh Ayātullah Imām Khomēini di kota Najaf, Irak. Dalam buku ini, ruang lingkup pembahasannya lebih sempit dan spesifik serta disesuaikan dengan yang hadir di kuliah Ayātullah Imām Khomeini, yaitu para pelajar ilmu-ilmu agama, yang nantinya diharapkan akan memiliki peran yang berpengaruh di dalam masyarakat Islam.[6]

Ada tiga poin penting (yang disampaikan) pada kuliah tersebut. *Pertama*, kebutuhan akan terbentuk dan terpeliharanya institusi politik Islam, atau dengan kata lain kebutuhan akan terbentuknya kekuatan politik sesuai tujuan-tujuan, aturan-aturan, dan kriteria-kriteria Islam. *Kedua*, tugas bagi para ulama (*fuqaha*) untuk membentuk negara Islam, dan mengambil peran dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Singkatnya, konsep tentang

---

[6] Ayatullah Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Ter, Muhammad Anis Maulachela (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm. 7.

pemerintahan yang dikepalai oleh seorang *faqih* (*Wilayatul Faqih*).[7] Dan *terakhir,* program kerja yang disusun oleh Ayātullah Imām Khomeini untuk membentuk sebuah negara Islam, termasuk standar-standar bagi reformasi yang dilandasi oleh penegakan yang religius (penegakan ajaran-ajaran Islam).[8]

Lebih lanjut Ayātullah Imām Khomeini mengatakan bahwa Islam merupakan sebuah bagunan dari suatu sistem yang merangkum semua dimensi masyarakat yang berdasarkan kepada perintah ketuhanan di atas segala sistem. Beliau berpandangan bahwa semua pemimpin rohani haruslah fasih dalam ajaran ketuhanan agar dapat memimpin masyarakat ke arah landasan Islam.[9]

Menurut Ayātullah Imām Khomeini, semua Muslim harus tahu bahwa Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslim sebagai satu kesatuan sosial. Beliau menambahkankan bahwa diwajibkannya kaum Muslim untuk mentaati *ulil al-amri*, di samping Allah dan Rasul-Nya, berarti diwajibkannya kaum Muslim membentuk pemerintahan. Sebab, tak ada gunanya suatu peraturan tanpa adanya kekuasaan eksekutif yang memaksakan pelaksanaan hukum Islam, khususnya sebagian daripadanya yang merupakan kewajiban.[10]

---

[7] *Faqih* adalah seseorang yang menguasai prinsip-prinsip dan aturan-atauran hukum Islam serta seluruh aspek keimanan.

[8] *Ibid*, hlm. 8.

[9] Ayatullah Imam Khomeini, *Jihad Akbar*, Terj. Ibrahim Mahmudi (Yayasan As-Sajjad, 1971), hlm. 8.

[10] Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung; Mizan, 2002), hlm. 116.

Negara, menurut Ayātullah Imām Khomēini adalah instrumen bagi pelaksanaan undang-undang Tuhan di muka bumi. Tidak seperti dalam Negara demokrasi (murni), pada dasarnya tidak ada hak negara atau legislatif, sebagai wakil rakyat untuk membuat undang-undang. Ketika memberi rakyat hak untuk membuat undang-uandang selain bertentangan dengan ajaran Islam, juga hanya akan memaksa negara untuk menerima perundang-undangan yang boleh jadi buruk tetapi merupakan kemauan rakyat, ataupun menolak perundang-undagan yang baik hanya karena bertentangan dengan kehendak rakyat, sedangkan pada dasarnya otoritas membuat undang-undang dan kedaulatan hanya ada di tangan Allah.

Dalam hal ini beliau menegaskan bahwa kelompok elit ahli (*wali* atau *authority*), yang paling mengetahui dan oleh karena itu, berhak menafsirkan hukum-hukum Tuhan. Seluruh bagian struktur politik negara mestilah dibawahkan kepada *wali* ini. Inilah yang disebut sistem *wilayah al-faqih*. Selebihnya jabatan-jabatan dalam struktur negara diserahkan kepada para ahlinya, baik dia ulama ataupun bukan. Meskipun demikian, kualifikasi berupa *fuqakaha* masih juga perlu dipertimbangkan bagi para pejabat pemerintahan karena semuanya bergantung pada seberapa penting dan menentukan bagi kemaslahatan rakyat.[11]

Mengingat dan menimbang begitu unik dan istimewanya pemikiran Ayātullah Imām Khomēini dalam menaggapi persoalan demokrasi, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa pengaruh dari pemikirannya sangat besar

[11] *Ibid*, hlm. 117-118.

terhadap pemikiran Islam. Penulis akan mencoba menelaah pemikiran Ayātullah Imām Khomeini dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah di ketengahkan di atas, penulis mencoba untuk merumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan dan kritik Ayātullah Imām Khomēini terhadap demokrasi?
2. Apa bentuk tawaran Ayātullah Imām Khomēini pada dunia politik Islam dalam menanggapi persolan demokrasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memahami latar belakang pemikiran Ayātullah Imām Khomēini, pandangan, kritik dan tawarannya terhadap demokrasi. Yang sampai sekarang masih ditemukan silang pendapat dalam menaggapi konsep demokrasi jika disandingkan dengan Islam.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah selain untuk memenuhi tugas akademik, penelitian ini akan menambah khazanah pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya membaca skripsi ini. Juga diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mempermudah bagi siapa saja

yang ingin meneliti tentang pemikiran Ayātullah Imām Khomeini, terutama yang berkaitan dengan demokrasi.

D. Telaah Pustaka

Penyusun mencoba mengkaji dan menyajikan pemikiran Ayātullah Imām Khomēini, terutama pandangan dan responya terhadap demokrasi. Bila ditelusuri buku-buku yang ditulis tentang pemikiran Ayātullah Imām Khomēini cukup banyak, atau paling tidak menjadikannya sebagai referensi sehingga terlihat adanya semacam kecenderungan bahwa belum lengkap sebuah diskusi, tulisan ataupun buku yang berbicara masalah agama dan negara tanpa menyinggung Ayātullah Imām Khomeini, terutama membahas tentang sepak terjangnya dalam dunia politik antara lain:

Buku yang ditulis oleh Yamani berjudul *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Islam*.[12] Buku ini mencoba mempersandingkan pemikiran politik Al-Farabi dan Ayātullah Imām Khomēini.

Buku yang ditulis Hamid Algar dan Robin W. Carl yang berjudul *Mata Air Kecemerlangan Suatu pengantar Untuk Memahami Pemikiran Khomeini*.[13]

Buku yang ditulis oleh Jonh L. Esposito dan John O. Voll, berjudul: "*Demokrasi di Negara-negara Muslim*". [14] Buku ini di samping mengkaji

---

[12] Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, (Bandung; Mizan, 2002).

[13] Hamid Algar dan Robin W.Carlsen, *Mata air Kecemerlangan*, Trj. Zainal Anidin (Bandung: Mizan, 1991).

perkembangan demokrasi di negara-negara Muslim seperti Pakistan, Al-Jazair, Sudan, Malaysia, juga membahas perkembangan demokrasi Iran.

Skripsi Musrin berjudul *Ayātullah Imām Khomeini; Pemikiran dan Perjuangannya*.[15] Skripsi ini mencoba mengulas bagaimana perjuangan dan perjalanan hidup Ayātullah Imām Khomeini sejak dinasti Pahlevi sampai ia mampu menjadi pemimpin besar revolusi Iran.

Skripsi Tafsirun berjudul *Konsepsi Ayatullah Imam Komeini Tentang Politik Islam (Tinjauan Hubungan Islam dan Politik dan Gagasan Wilayat Faqih).*[16] Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat Ayātullah Imām Khomēini tentang hubungan Islam dan politik serta teori pemerintahan Islam (*Wilayat Faqih*) yang digagasnya.

Skripsi Agus Reynadi berjudul *Konsep Negara Menurut Ayātullah Imām Khomeini dan Abdurrahman Wahid*.[17] Skripsi ini ,membahas bagimana konsep negara menurut Ayātullah Imām Khomeini dan Abdurrahman Wahid dan memperbandingkan antara keduanya tau studi komparatif.

---

[14] John L Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim,* terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999).

[15] Musrin, *Ayatullah Imam Khomeini; Pemikiran dan Perjuangan*, Skripsi (yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 1996).

[16] Tafsirun, *Konsepsi Ayatullah Khomeini Tentang Politik Islam (Tinjauan Hubungan Islam dan Politik dan Gagasan Wilayat Faqih)*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2000).

[17] Agus Reynaldi, *Konsep Negara Menurut Ayatullah Imam Khomeini dan Abdurrahman Wahid*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2003).

Skripsi Taufiq Hidayat Simanjuntak berjudul *Konsep Tasawuf Ayātullah Imām Khomeini* .[18] Skripsi ini hanya terfokus pada konsep tasawuf menurut pandangan Ayātullah Imām Khomeini saja dan tidak menyinggung sama sekali ranah pemikiran politiknya.

Sepanjang pengamatan dan sepengetahuan penulis, hingga saat ini belum ada orang yang meneliti tentang demokrasi dalam pandangan Ayātullah Imām Khomeini yang mengkaji secara khusus dan mendalam. Seperti judul penelitian ini.

Di sini penulis berangkat dari literatur-literatur primer yang menjadi acuan sekaligus rujukan bagi penulis adalah karya Ayātullah Imām Khomēini yang berjudul, *Wilayat Faqih atau Humat Islami*, buku ini telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berjudul *Sistem Pemerintahan Islam*. Di samping itu penulis juga mempergunakan karya Ayātullah Imām Khomeini yang lain yang berjudul, *Jihad Akbar*. Selain menggunakan data primer yang telah penulis sebutkan diatas, penulisan karya ilmiah ini juga di dukung oleh beberapa data sekunder lainnya.

E. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan suatu metode yang jelas, begitu juga dengan penelitian ini. Berikut ini beberapa aspek metodologis yang penulis gunakan.

---

[18] Taufiq Hidayat Simanjuntak, *Konsep Tasawuf Ayatullah Imam Khomeini*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004).

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan me-*recover* buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian dalam skripsi ini. Data primer itu berupa buku-buku yang ditulis Ayātullah Imām Khomēini yang berjudul *Wilayat Faqih atau Umat Islami*, dan data primer lainnya diambil dari beberapa buku-buku atau karya ilmiah yang secara umum yang mengkaji dan membahas tentang pemikiran Ayātullah Imām Khomēini. Sedangkan data sekundernya diambil dari buku-buku yang membahas tentang politik Islam secara umum, seperti buku yang ditulis oleh al-Jabiri, al-Maududi, dan seterusnya.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah *filosofis-historis*, karena penelitian ini sifatnya *tematik tokoh*. Filosofis artinya, melakukan telaah atas bagunan pemikiran sang tokoh Ayātullah Imām Khomēini dengan melihat kerangka teoritis yang digunakan di dalam menganalisis data-data, maupun fakta-fakta, berkisar problem yang dihadapi, sehingga nantinya akan terlihat kerangka maupun alur dari pemikiran tokoh.[19]

Sedangkan historis, dimaksudkan untuk menempatkan sang tokoh dalam batasan ruang dan waktu tertentu. Artinya, di sini sang tokoh tidak sekedar dilihat hanya pada batasan pemikiran filosofisnya saja, tetapi lebih jauh dari itu, untuk melihat latar belakangnya, guna mengetahui sebab-

[19] Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafa*t (Yogyakarta: Kanisius, 1990) hlm. 61.

sebab orientasinya dalam melihat realitas yang sedang berlangsung maka dalam hal ini adalah realitas Iran.

3. Teknik Pengolahan Data

Agar memudahkan pengolahan data, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode:

a. *Deskriptif;* dalam hal ini peneliti akan mencoba menguraikan dan mengungkapkan pemikiran tokoh agar data-data atau pun problem permasalahan nantinya dapat terkumpul. Unsur ini digunakan untuk memaparkan terutama sekali biografi tokoh objek kajian. Dan hal ini mampu menyingkap latar belakang, konteks, dan alur pemikiran sang tokoh.

b. *Interpretatif;* artinya menginterpretasikan tentang demokrasi dalam pandangan sang tokoh. Akan tetapi, interpretsi ini dilakukan masih dalam batasan alur pemikiran. Hal ini dilakukan guna menemukan maksud apa yang dipikirkan oleh tokoh tersebut.[20] Dengan begitu, diharapkan nantinya akan bisa diperoleh suatu pemahaman yang benar pula tentang ciri, sifat, latar belakang dan ide-ide dasar Ayātullah Imām Khomeini sendiri terutama pandangannya mengenai demokrasi.

[20] *Ibid*, 63-65.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman isi dan esensi dari skripsi ini. Maka skripsi ini akan disistematisasikan penyajiannya berdasarkan kategoresasi pembahasan sebagai berikut:

Diawali dengan *Bab I*, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya *Bab II*, membahas tentang akar historis demokrasi serta perkembangannya meliputi pengertian demokrasi, demokrasi dalam tradisi Barat, dan demokrasi dalam tradisi Islam.

Kemudian *Bab III*, pusaran intelektual Ayātullah Imām Khomeini meliputi biografi, latar belakang pemikiran, kondisi sosio-historis, dan karya-karya.

Bab IV, menguraikan pandangan, kritik dan tawaran Ayātullah Imām Khomeini terhadap demokrasi.

Terakhir *Bab V*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis berdasarkan seluruh hasil pembahasan yang dilakukan dan ditekuni selama dalam proses awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang penyusun paparkan di atas, pembahasan tentang demokrasi dalam pandangan Ayatullah Imam Khoemeini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pandangan Ayatullah Imam Khomeini, unsur demokrasi diberi tempat dalam sedikitnya dua aspek. *Pertama*, dalam bentuk pemberian hak bagi rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpinnya, baik secara langsung maupun lewat sistem perwakilan, melalui berbagai pemilu yang diadakan. *Kedua*, rakyat diberi hak untuk menyalurkan aspirasinya lewat berbagai saluran yang telah disediakan oleh mekanisme politik dan kenegaraan, termasuk lewat pemimpin-pemimpin yang mereka pilih lewat pemilu tersebut. Di balik itu, pengambilan-pemgambilan keputusan mungkin dengan mengecualikan pengambilan keputusan mengenai hal-hal amat penting yang oleh Konstitusi diamanatkan untuk dilakukan lewat referendum yang melibatkan seluruh rakyat, sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah. Lebih dari itu, seperti tampak dalam komentar Ayatullah Imam Khomeini tentang Konstitusi seperti tersebut di atas, sebagian besar wewenang itu hendaknya diberikan kepada Sang Pemimpin. Meskipun aspirasi rakyat mendapat tempat yang amat penting, posisinya berada dibawah hukum dan pada puncaknya, di bawah kepentingan negara. Kebebasan itu sendiri harus

ada yang membatasi, yaitu hukum. Kehendak rakyat harus sejalan dengan kehendak Tuhan dan mekanisme kesejajaran kehendak tersebut dijaga oleh mekanisme yang disebut Ayataullah Imam Khomeini dengan *wilayah al-faqih,* dan ini merupakan suatu bentuk tawaran Ayatullah Imam Khomeini terhadap dunia perpolitikan Islam, khususnya Republik Islam Iran.

Dalam sistem *wilayat al-faqih*, kaum ulama menduduki posisi sebagai pengawal, penafsir maupun pelaksana hukum-hukum Tuhan, ia merupakan pelanjut bagi misi kenabian guna memlihara agama dan mengatur urusan dunia. Segala bentuk undang-undang adalah hak mutlak Tuhan, seorang pemimpin posisinya hanya sebagai pelaksana hukum Tuhan. Dengan kata lain, apa pun kebebasan yang muncul, harus tetap sesuai dan sejalan dengan hukum Tuhan yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita keadilan di muka bumi akan dapat terealisasikan secara baik dan benar. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan sistem demokrasi modern, maka nampak sekali adanya relevansi antara keduanya. Namun demikian, ada satu perbedaan yang merupakan ciri khas dari konsep *Wilayat al-Faqih* jika dibandingkan dengan sistem demokrasi modern, yaitu bahwa pembuat undang-undang (legislatif) adalah hak mutlak Tuhan. Sedangkan pemimpin posisinya hanya sebagai pelaksana hukum Tuhan.

B. Saran-saran

Penyusun menyadari bahwa telaah ini belum cukup mampu mengungkapkan secara detail dan komprehensif bagaimana pandagan Ayatullah Imam Khomeini tentang demokrasi. Untuk itu perlu kiranya dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh studi-studi tentang demokrasi.

1. Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, kesulitan yang dihadapi umat Islam dewasa ini bagaimana menimplementasikan demokrasi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik menyangkut persoalan individual, sosial maupun negara bahkan lintas negara. Karena bagaimanapun umat Islam lebih suka menerapkan demokrasi liberal ala Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang ini.
2. Penelitian tentang demokrasi dalam Islam dan implementasi dalam konteks sekarang ini perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Tentang peranan dan bentuk-bentuk lembaga negara serta pola hubungan antar berbagai lembaga negara, dalam demokrasi serta kaitannya demokrasi dalam aspek vertical maupun horizontalnya tidak menutup kemungkinan untuk dibahas lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Algar, Hamid dan Robin W.Carlsen, *Mata air Kecemerlangan*, Trj. Zainal Anidin, Bandung: Mizan.

Algar, Hamid, *Imam Khomeini Sang Sufi, dalam Mta Air Kecemerlangan*, Bandung: Mizan, 1991.

Asawa, Iqbal, *Iran: Syatu Studi Kasus Kebangkitan Politik Muslim dalam Gerbang Revolusi Iran dan Khomeinidalam Perbincangan*, Trj. Tim Naskah Sallahuddin, Yogyakarta: Sallahuddin Press, 1984.

Asy'arie, Musa, *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berfikir*, Yogyakarta: LESFI, 1999.

Azis, Abdul, A. Sachedina, *Kepemimpinan Dalam Islam: Prespektif Syi'ah,* terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1991.

Bagus, Lorens *Kamus Filsafat,* cet. ke-3, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Budiardjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia, 1993.

Carl, L Brown, *Wajah Islam Politik: Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat,* Trj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2003.

Diamond, Larry, *Developing Democracy; Toward Consolidation*, Yogyakarta: IRE Press, 2003.

Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni-Syi'ah,*terj. Asep Hikmat, Bandung: Pustaka, 1988.

Esposito, Jhon L dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim,* terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.

Hasan, Riza, *Islam: Dari Konservatisme Sampai Fundamentalisme,* Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Hidayat, Taufiq Simanjuntak, *Konsep Tasawuf Ayatullah Imam Khomeini*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Husein, Sayid Tabataba'i, *Islam Syi'ah : Asal-usul dan Perkembangannya,* terj. Djohan Efendi, Jakarta: Grafiti, 1993.

Hoogerwerf, A *Politikologi,* R.L.L Tobing, Jakarta: Erlangga, 1985.

Hook, Sidney, *Demokrasi: Sebuah Tijauan Umum, Menegakkan Demokrasi: Pandangan Sejumlah Tokoh dan Kaum Muda Mengenai Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Kleompok Studi Indonesia, 1989.

Jabiri, Muhammad Abed Al-, *Syura: Tradisi, Partikularitas dan Universalitas,* Yogyakarta: LKiS, 2003.

Kamal, Mustafa Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, Magelang: IndonesiaTera, 2001.

Khomeini, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, Trj, Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.

Khomeini, Imam, *Jihad Akbar*, Trj, Ibrahim Mahmudi, Yayasan As-Sajjad, 1971.

Lewis, Bernard, *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, Jakarta: Paramadina: 2002.

Majid, Nurcholis, "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan" dalam jurnal pemikiran Islam, *Paramadina*, Vol I, No.1, Juli-Desember 1998.

Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Markoff, Jhon, *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, Trj. Ari Setyaningrum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Masdar, Umaruddin, *Membaca pemikiran Gusdur dan Amien Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Maududi, Abu al-'Ala, *Sistem Politik Islam,* terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1994.

Mawardi, Al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam,* terj. Kartami dan Nurdin, Jakarta: Gema Insari Press 2000.

Montgomery, William Watt, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah,* terj. Helmi Ali, Jakarta: P3M, 1988.

Mortimer, Edward, *Islam dan Kekuasaan,* terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1984.

Mousawwi, Ahmad, dalam Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-masalah Teori Politik Islam,* terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.

Muhammad, Sayyid Husein Jafri, *Dari Saqifah Sampai Imamah,* terj. Meth Kierena, Jakarta: Pustaka Hidayat, 1989.

Musrin, *Ayatullah Imam Khomeini; Pemikiran dan Perjuangan*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 1996.

Muzaffari, Mehdi, *Kekuasaan Dalam Islam,* terj. Abdurrahman Ahmed, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.

Moin, Baqer, *Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas dalam Para Perintis Zaman Baru Islam*, Trj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1996.

Nasution, Harun, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam* Jakarta: CV. Guna Aksara, 1989.

Nasution, Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Pasha, Mustafa Kamal, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

Reynaldi, Agus, *Konsep Negara Menurut Ayatullah Imam Khomeini dan Abdurrahman Wahid*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Riza, M Sihbudi, *"Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Wilayati Faqih," makalah seminar tentang Sistem Ketatanegaraan dan Politik dalam Prospektif Islam,* Jakarta: 1993.

Riza, M Syahbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1989.

Rosyada, Dede dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi ke-5, Jakarta: UI-Press, 1993.

Sudjana, Eggi, *Ham: Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, Bogor: Yayasan Assyahidah, 1998.

Suparda, Kifralwi, *Islam dan Demokrasi Dalam Pandangan Abid Al-Jabiri dan Abu Al-A'la Maududi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN SUKA, 2007.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Solly, M Lubis, *Ilmu Negara*, cet. I, Bandung : Alumni, 1975.

Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*, Trj. Made Krisna, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Syamsuddin, Din, "Beberapa Catatan Kritis Usaha Pencarian Konsep Tentang Negara dalam Sejarah Politik Islam", makalah seminar, Jakarta 1993.

Tafsirun, *Konsepsi Ayatullah Khomeini Tentang Politik Islam (Tinjauan Hubungan Islam dan Politik dan Gagasan Wilayat Faqih)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2000.

Thaha, Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais,* Yogyakarta : Teraju, 2005.

Tholchah, Muhammad Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural: Pandangan Intelektual Islam Tentang Masalah Politik*, Jakarta:Lantabora Press, 2000.

Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat*, Bandung: Rosdakarya, 1995.

Warson, Amad Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* Yogyakarta: PP. Krapyak, 1990.

Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2003.

Yamani, *Wasiat Sufi Ayatullah Imam Khomeini: Aspek Sufistik Ayatullah Imam Khomeini Yang Tak Banyak Diketahui*, Bandung: Mizan, 2001.

Zada, Khamami dan Arif R. Arafah, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP, 2004.

HPI. Com. Iran, www.islamalternatif.com.

http://www.12-imam.com/data-biografi/imam_khomeini.htm.

http://omperi.wikidot.com/9-perintis-kebangkitan-islam.

BIODATA PENULIS

Nama	: Joni Amran
Tempat/Tgl Lahir	: Cumanting 12 Juni 1984
Alamat Asal	: Lubuak Nunang, Jorong Batang Silasiah, Kenagarian Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kab. Agam. Sumbar 26191.
Alamt sekarang	: Jl. Timoho Gg. Gading No. 22 B Ngentak Sapen Yogyakarta.
Email	: joniamran@yahoo.com.

Jenjang Pendidikan:

- Sekolah Dasar No 40 Batang Silasiah, selesai tahun 1996.
- MTs, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pasir, selesai tahun 2000.
- MA, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pasir, selesai tahun 2003.